

PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSI, PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(Studi Empiris Sekertariat Daerah Kabupaten Bantul)

Juniarti¹

Email: Ny.Juniarti@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dosen Pembimbing

Alek Murtin.,SE., M.Si., Ak., CA

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of understanding the accounting system, budgetary participation, organizational commitment and internal control on the performance of regional work units. The subjects in this study were the head of the section, the head of the sub. Section, head of field, head of sub. Division and section head in Bantul Regency. In this study a sample of 111 respondents were selected using the purposive sampling method. The hypothesis in this study was tested by multiple regression using the SPSS program. Based on the analysis that has been done, it is obtained that the understanding of the accounting system and internal control has a positive and significant effect on the performance of the work units of the regional apparatus while participation in budgeting and organizational commitment does not affect the performance of the work unit of the regional apparatus.

Keywords: *Understanding Accounting System, Budgeting Participation, Organizational Commitment, Internal Control, Regional Work Performance*

PENDAHULUAN

Suatu lembaga baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan kinerja nya harus memiliki landasan yang kuat untuk bisa dijadikan pedoman ketika melakukan kegiatan atau program kerja. Oleh sebab itu pemerintah menyusun beragam rangkaian konsep yang salah satu nya adalah konsep anggaran, karena dalam suatu anggaran dapat

membuktikan peran dari lembaga tersebut.

Dalam pemerintah daerah pelaksanaan akuntansi tidak terlepas dari aturan legal yang wajib ditaati. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 yang dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan manajemen keuangan daerah. Dari semua dasar hukum diatas mengatakan bahwasanya pemerintah

daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. pada dasarnya setiap substansi mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Apa lagi organisasi publik yang sumber dana nya di peroleh dari masyarakat/publik. Karena kegiatan dan aktivitas yang dilakukan menggunakan dana dari publik maka publik berhak tau atas pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut.

Seperti yang sudah diberitahukan bahwasanya Pemerintah daerah se Indonesia harus menerapkan sistem akuntansi yang baru yaitu sistem akuntansi berbasis *accrual* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2015 berdasarkan PP No.71 tahun 2010 yang sebelumnya adalah PP No.24

tahun 2005, sebelumnya Pemda Bantul menggunakan sistem akuntansi berbasis Kas, dimana uang belum diterima sudah dicatat dan dianggap sebagai pendapatan, berbeda dengan sistem akuntansi berbasis *accrual* dimana pencatatan pendapatan dan pengeluaran saat sudah benar-benar menerima atau mengeluarkan uang nah sistem ini dianggap lebih efektif untuk mengetahui laporan keuangan yang rill pada masing-masing daerah. Berdasarkan laporan hasil kinerja dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK DIY) Pemda Bantul belum melakukan sistem akuntansi berbasis *accrual* dengan maksimal, dikarenakan kurangnya jumlah SDM dalam pengelola keuangan, aset dan TI. Berikut ini tabel dari hasil pemeriksaan oleh BPK dari 7 SKPD secara uji petik yang menunjukkan kekurangan SDM dalam mengelola keuangan, aset dan TI

Tabel 1**Kurangnya SDM dalam pengelolaan keuangan, Aset dan TI**

No	SKPD	Jabatan	Butuh Orang	Realisasi Orang	Kurang Orang
1.	Sekretariat Daerah - Bagian Tapem - Bagian Hukum - Bagian Umum	Bendahara Bendahara Bendahara	2 1 6	1 0 3	1 1 3
2.	Dinas Kesehatan - Puskesmas Bantul 1 - Puskesmas Bantul 2	Bendahara Pengadministrasi Barang Pengadministrasi Keuangan Bendahara Bendahara	3 3 11 4 4	2 2 10 1 2	1 1 1 3 2
3.	Dinas Pendidikan Dasar - UPTPKec. Pajangan - UPT Kec. Pleret	Pengadministrasi Barang Pengadministrasi Barang	1 1	0 0	1 1
4.	DPPKA	Verifikator Keuangan Pemegang Buku	2 2	1 1	1 1
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan - UPT Balai Benih Ikan	Bendahara Bendahara	6 1	5 0	1 1
6.	KPMD	Pengadministrasi Barang	2	1	1
7.	Kantor Kesbangpol dan Limas	Pengadministrasi Barang	2	1	1

Sumber : LHPK Pemda Bantul oleh BPK DIY tahun 2015

Dalam mengatasi hal ini Pemda Bantul berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman sistem akuntansi para pegawai dengan cara melakukan sosialisasi, pelatihan, pendampingan (*coaching*) dalam penyusunan neraca SKPD. Namun dengan upaya tersebut ternyata pegawai belum juga memahami sistem akuntansi dengan maksimal, Hal ini terlihat pada beberapa pekerjaan signifikan dalam penyusunan laporan keuangan belum dilakukan yaitu data awal aset tetap dan aset lainnya per 31 Desember 2014 (*Audited*) dan mutasi tahun 2015 belum diinput dalam aplikasi SIMDA BMD

Dalam memenuhi kewajibannya pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku yaitu berbasis accrual, dimana agar hasil laporan keuangan dapat disajikan secara terperinci dan sesuai dengan kenyataan. Penelitian oleh Saifulloh (2013) menunjukkan hasil

bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2015), Hikmatul (2016) dan Azidatur (2018) yang menunjukkan hasil bahwa kinerja aparatur SKPD memiliki hubungan yang kuat dengan pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah. Tetapi berbeda halnya dengan hasil penelitian dari Tuasikal (2008) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah.

Riset yang menjelaskan tentang adanya kaitan antara ikut serta dalam rangkaian menyusun anggaran terhadap aktivitas kegiatan aparat pemerintah masih sering diperdebatkan. Beberapa riset mengenai hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Misalnya saja (Nor 2007) dalam setiawan (2009:4) menemukan bahwa

partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja memiliki hubungan yang sangat positif. Menurut Sardjito dan Muthaher (2007) ikut serta dalam rangkaian penyusunan anggaran dapat menambah kinerja manajerial pada anggota organisasi jika atasan setingkat kepala dinas peduli dan perhatian terhadap komitmen para bawahan dalam partisipasi untuk menyusun anggaran maka tujuan sasaran akan dapat dicapai. Syafrial (2009) dan bangun (2009) juga telah membuktikan bahwa dengan ikut serta dalam proses penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Adamy (2010) dan Riharjo (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat daerah. Hasil penelitian di atas berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Sukardi (2002) dalam Bambang dan Osmand (2007) hasil penelitian tersebut menunjukkan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran

dengan kinerja aparat pemerintah daerah yang tidak signifikan, Karena faktor-faktor yang situasional atau variabel kontinjensi yang mempengaruhi hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat daerah. Sejalan pula dengan hasil penelitian Ekky (2015), Setyawan (2012) dan Azidatur (2018) yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap organisasi pemerintah daerah.

Dalam kinerja pemerintah daerah ada beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah Komitmen Organisasi, karena berhubungan dengan individu itu sendiri maupun dengan lingkungan perusahaan atau organisasi dimana dia bekerja, Komitmen organisasi sendiri dapat dijadikan tolak ukur atau indikator dalam pemerintah daerah dalam menilai kinerja SKPD. Dengan komitmen Organisasi yang kuat maka menimbulkan rasa keyakinan yang tinggi untuk bekerja dan berpartisipasi semaksimal mungkin dalam mencapai sasaran sebuah

organisasi (Edfan, 2001). Jika komitmen seseorang terhadap perusahaan atau sebuah organisasinya rendah maka cenderung seseorang tersebut hanya akan memenuhi keinginan pribadinya dibandingkan kebutuhan organisasi (Bambang, 2007). Kinerja sektor publik dapat optimal jika didukung dengan Komitmen organisasi yang tinggi dari individu itu sendiri (Yessi Mutia, 2009), Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Siti Aisyah (2014), Wulandari (2011) dan Kharisma (2015) yang menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Safitri (2017) Azidatur (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja dalam organisasi maka diperlukannya sistem pengendalian intern. (Aren, 2008) Sistem pengendalian intern

adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan yang sesuai dengan hasil dalam pencapaian sasaran dalam hal keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien dll. Ramdey (2009) yang menunjukkan bahwa Pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah jayapura. Hal ini sejalan dengan penelitian Ranti Oktari (2011), Irene Chintya (2015) dan Gustika (2008), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Menurut Agustina (2004) sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap pengendalian internal. Sedangkan Sistem akuntansi, pengelolaan keuangan, pengendalian internal tidak ada pengaruh terhadap SKPKD.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anung (2012) dengan judul “ Pengaruh Pemahaman sistem

akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD kab. Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta ”. Faktor yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, Disini peneliti menambah variabel komitmen organisasi dan pengendalian intern, sampelnya diambil dari kabupaten Bantul Provisinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitan ini adalah :

1. Apakah pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah ?
2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah?

4. Apakah pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah Pemahaman sisstem akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah ?
2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah?
3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah?
4. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

Teori stewardship

Dalam penelitian Zoelisty (2014) mengatakan bahwa teori stewardship dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Oleh sebab itu manusia merupakan subjek utama penggerak ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, maka pendapat stewardship bisa digunakan dalam riset akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan

1). Pemahaman Sistem Akuntansi

Dalam penelitian Syahrída (2009) menjelaskan bahwa organisasi pemerintah ada dua keperluan yang dilaksanakan dalam menggerakkan roda pemerintah, yaitu profit dan non profit. Kecenderungan pada profit adalah Badan usaha milik daerah (BUMD). Sebab itu dalam mengelola administrasi

pemerintah harus paham sistem akuntansi dan mereka juga wajib memahami sistem pelaporann akuntansi dan bagaimana menggunakan informasi akuntansi sebagai alat perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian.

Saifulloh (2013) Pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada dinas pemerintah kabupaten Subang. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2015) dan Hikmatul (2016) menunjukkan hasil bahwa kinerja aparatur satuan kerja pemerintah daerah memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian Tuasikal (2008) bahwa pemahaman sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Berdasarkan uraian diatas dapat di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD

2). Partisipasi Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat bekerjasama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dikerjakan oleh Gubernur dengan adanya ide-ide yang diutarakan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada Gubernur, Selanjutnya bersama dengan DPRD menentukan anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. (Sarjito dan Osmad, 2007)

Mediaty (2012) menunjukkan hasil adanya pengaruh signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil yang serupa ditunjukkan oleh hasil penelitian saifulloh (2013) bahwa terdapat pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran

terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Namun hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Setyawan (2012) dimana hasil penelitiannya menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah. Hal ini juga serupa dengan hasil penelitian dari Ekky (2015) yang menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD

3). Komitmen Organisasi

Kesuksesan dalam menjalankan sebuah organisasi amatlah dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusia. Kuat tidaknya komitmen pegawai dalam organisasi tempat mereka bekerja amatlah

mempengaruhi prestasi kinerja yang akan dicapai didalam organisasi.

Dalam penelitian Mediaty (2012) dan Kharisma (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi dan kinerja aparat pemerintah daerah. Sejalan dengan hasil penelitian Wulandari dan Mutmainah (2011) yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2017) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja aparat pemerintah. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H₃: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD

4). Pengendalian Intern

PP No.60 tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses

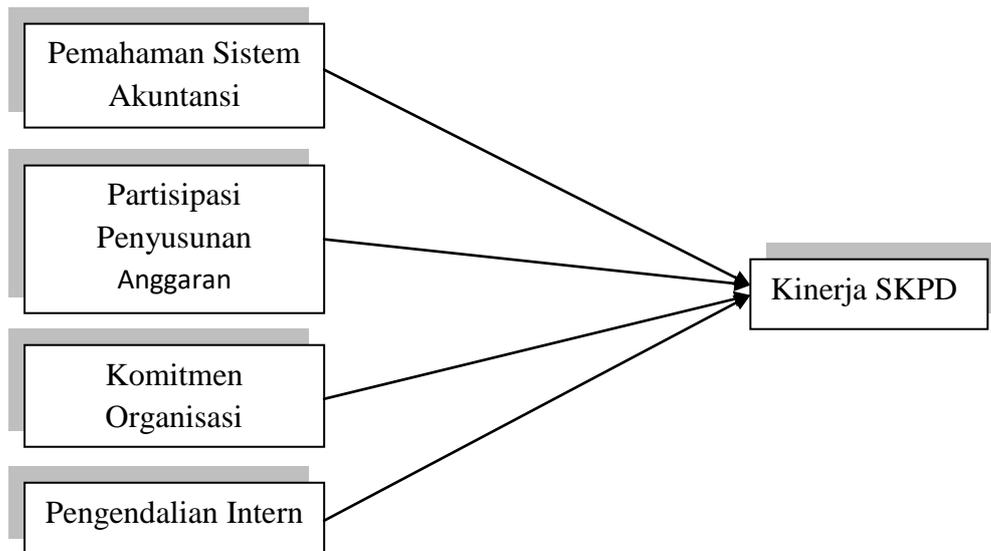
kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian Ranti oktari (2011) pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian dengan hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Chintya (2015) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD

Model Penelitian



METODE PENELITIAN

Obyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah kabupaten Bantul provinsi DIY yaitu seluruh instansi pemerintah, yang terdiri dari dinas, kantor, badan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan pemerintah pada tingkat kabupaten/kota. Populasi nya adalah pegawai atau staff yang ada di satuan kerja perangkat daerah kabupaten Bantul dan respondenya adalah eselon III dan IV. Pejabat ini dipilih karena memiliki wewenang dan berperan penting dalam proses penyusunan anggaran. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer

yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Instrumen yang digunakan adalah kuisisioner. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah penentuan sampel yang didasarkan pada kreteria atau pertimbangan tertentu. Kreteria-kreteria dalam sampel ini adalah perangkat dari instansi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada badan di pemerintah daerah yang menduduki jabatan sebagai kepala (kabag), kepala bidang (kabid), kepala seksi (kasi), kepala subidang (kasubid) dan kepala sub bagian (kasubag).

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah metode untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel

dependen. Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda (*Multiple Regression*) dengan program SPSS yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Keterangan :

- Y : Satuan Kerja Perangkat Daerah
- α : Konstanta
- β_1 – β_4 : Koefesien Regresi
- X1 : Pemahaman Sistem Akuntansi
- X2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran
- X3 : Komitmen Organisasi
- X4 : Pengendalian Internal
- ε : Error Term (tingkat kesalahan praduga dalam penelitian)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyebaran kuisoner yang telah dilakukan diperoleh data yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini yang menunjukkan jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuisoner yang dijawab oleh responden.

Tabel 2
Hasil Penyebaran Kuisoner

Keterangan	Jumlah
Total penyebaran kuisoner	120
Jumlah kuisoner yang tidak kembali	9
Jumlah kuisoner yang kembali	111
Jumlah kuisoner yang tidak diisi lengkap (cacat)	0
Total kuisoner yang akan diolah	111
Tingkat pengembalian (Response Rate)	92,50%

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 120 kuisioner yang dibagikan kepada responden, jumlah kuisioner yang kembali adalah 111 eksemplar atau dengan kata lain penelitian ini mempunyai response

rate sebesar 92,50%. Dari jumlah kuisioner yang kembali semua di isi lengkap dan tidak cacat, sehingga semua kuisioner dapat diolah sejumlah 111 eksemplar.

Statistik Deskriptif

Tabel 3
Descriptive Statistics

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PSA	111	22	35	28,94	2,961
PPA	111	18	35	26,84	3,167
KO	111	23	45	34,99	3,923
PI	111	24	40	34,11	3,576
K	111	29	45	37,88	3,440
Valid N (listwise)	111				

Tabel 3 menjelaskan jumlah jawaban minimum responden, jawaban maksimum

dengan rata-rata total jawaban dan standar deviasi.

Uji Validitas

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan untuk semua variabel valid dan signifikan dimana seluruh item pertanyaan dari semua variabel memiliki nilai faktor loading > dari 0,5

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabel	Keterangan
K	0,861	0,60	Reliabel
PSA	0,861	0,60	Reliabel
PPA	0,816	0,60	Reliabel
KO	0,835	0,60	Reliabel
PI	0,891	0,60	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap seluruh item pernyataan diperoleh hasil *cronbach's Alpha* > 0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas atau dengan kata lain bahwa kuisioner ini reliabel sebagai instrumen penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		111
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,19275069
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z		1,092
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,184

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu 0,184 > α (0,05), karena sig lebih besar dari nilai alpha (0,05), maka dapat

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
PSA	0,469	2,132	Bebas Multikolinieritas
PPA	0,606	1,650	Bebas Multikolinieritas
KO	0,669	1,494	Bebas Multikolinieritas
PI	0,630	1,587	Bebas Multikolinieritas

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa pada masing-masing variabel independen nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Varinace Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig	Standar Sig	Keterangan
PSA	0,068	0,05	Bebas Heterokedastisitas
PPA	0,380	0,05	Bebas Heterokedastisitas
KO	0,653	0,05	Bebas Heterokedastisitas
PI	0,259	0,05	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai *sig* pada masing-masing variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada

masing-masing variabel independen tidak terjadi heterokedastisitas

.Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koef. B	T	Sig	Keterangan
(Constant)	10,115	3,971	0,000	
PSA	0,783	7,455	0,000	Positif, Signifikan
PPA	-0,085	-0,987	0,326	Negatif, Tidak Signifikan
KO	0,051	0,768	0,444	Positif, Tidak Signifikan
PI	0,165	2,195	0,030	Positif, Signifikan
F Statistic	38,71			
Sig F	0,000			
Adjusted R Square	0,578			

Dependent Variabel : K

Sumber : data yang diolah, 2019

Hasil perhitungan regresi pada tabel 8 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$K = 10,115 + 0,783 PSA - 0,085 PPA + 0,051 KO + 0,165 PI + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis 1 (H^1)

Hasil pengujian H_1 pada tabel 8 menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 0,783, nilai t sebesar 7,544 dengan nilai sig (0,000) < α (0,05). Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa koefisiensi regresi menunjukkan arah positif dan nilai sig menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian hipotesis pertama didukung.

Hasil Pengujian Hipotesis 2 (H^2)

Hasil pengujian H_2 pada tabel 8 menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai negatif 0,085, nilai t sebesar -0,987 dengan nilai sig (0,236) > α (0,05). Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa koefisien regresi menunjukkan arah negatif

dan nilai sig menunjukkan hasil yang tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian hipotesis kedua tidak didukung.

Hasil Pengujian Hipotesis 3 (H^3)

Hasil pengujian H_3 pada tabel 8 menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 0,051, nilai t sebesar 0,768

Hasil pengujian H_4 pada tabel 8 menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai positif 0,165, nilai t sebesar 2,195 dengan nilai sig ($0,030 < \alpha (0,05)$). Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa koefisien regresi menunjukkan arah positif dan nilai sig menunjukkan hasil yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Dengan demikian hipotesis keempat berhasil didukung.

dengan nilai sig ($0,444 > \alpha (0,05)$). Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa koefisien regresi menunjukkan arah positif dan nilai sig menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga tidak didukung.

Hasil Pengujian Hipotesis 4 (H^4)

Hasil Uji F

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa nilai f hitung sebesar 38,71 dan nilai sig F ($0,000 < \alpha (0,05)$) yang artinya bahwa pemahaman sistem akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran, komitmen organisasi dan pengendalian intern secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa nilai adjusted R Square adalah 0,578 yang artinya bahwa 57,8% variabel kinerja SKPD dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman sistem akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran,

Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja keputusan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah kabupaten Bantul harus yang memiliki tingkat pemahaman sistem akuntansi yang tinggi atau memadai mengenai keuangan daerah. Dengan memiliki tingkat pemahaman sistem akuntansi yang tinggi maka dapat meningkatkan kinerja dalam organisasi pemerintah, baik dalam pengambilan keputusan maupun pengendalian aktivitas pengelolaan keuangan dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Saifulloh (2013), Abdullah (2015) dan Hikmatul (2016) yang

komitmen organisasi dan pengendalian intern, sedangkan sisanya sebesar 42,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Terhadap Kinerja SKPD

perangkat daerah. Hal ini menunjukan bahwa dalam pengambilan keputusan menyatakan bahwa pemahaman sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) yang menyatakan pemahaman sistem akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja SKPD

Hasil hipotesis partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh

positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Ini terlihat dari keputusan yang diambil oleh kepala SKPD, dimana keputusan tersebut tidak mencerminkan adanya pegawai lain yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, walaupun sebenarnya tingkat SKPD, Berdasarkan peraturan Bupati bantul No.93 tahun 2015 :

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pasal 8

- Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. menandatangani SPM;
 - h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - m. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - n. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Adamy (2010), Mediaty (2012) dan Riharjo (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2012) dan Ekky (2015) yang menyatakan bahwa partisipasi

partisipasi penyusunan anggaran di pemerintah daerah Bantul cukup tinggi namun pengambilan keputusan masih sangat bergantung pada kepala SKPD, dengan kata lain partisipasi penyusunan anggaran tidak mempengaruhi hasil keputusan yang akan diambil oleh kepala

anggaran tidak berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja SKPD

Hasil hipotesis komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Hal ini terlihat pada rendahnya serapan anggaran di beberapa Organisasi di

pemda Bantul, Ini adalah salah satu akibat dari kurangnya tingkat komitmen organisasi dari pegawai, Dengan begitu banyak program atau kegiatan pembangunan yang belum dilaksanakan. APBD kabupaten Bantul masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat, pendapatan daerah masih di

dominasi oleh dana perimbangan, sementara itu kontribusi PAD masih minim, bisa dilihat pada tahun 2015 realisasi PAD untuk APBD kabupaten Bantul sebesar Rp. 79.773 sedangkan dana perimbangan mencapai angka Rp. 338.265.448 pada gambar tabel dibawah ini



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
(Unaudited)

URAIAN	JUMLAH TA 2015			
	ANGGARAN	REALISASI S/D MARET	selisih	%
	9	10	10	
A PENDAPATAN	1,857,098,630,926.18	508,829,890,350.19	(1,348,268,740,575.99)	27.40
PENDAPATAN ASLI DAERAH	312,419,913,746.54	79,773,465,900.19	(232,646,447,846.35)	
1 Pajak Daerah	85,000,100,000.00	23,800,200,747.58	(61,199,899,252.42)	28.00
2 Retribusi Daerah	26,774,227,400.00	5,204,445,382.00	(21,569,782,018.00)	19.44
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	16,049,617,546.54	17,000,969,305.24	951,351,758.70	105.93
4 Lain-Lain PAD	184,595,968,800.00	33,767,850,465.37	(150,828,118,334.63)	18.29
DANA PERIMBANGAN	1,037,859,454,842.00	338,265,448,450.00	(699,594,006,392.00)	32.59
1 Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	33,905,757,842.00	5,650,991,450.00	(28,254,766,392.00)	16.67
2 Dana Alokasi Umum	942,850,827,000.00	314,283,596,000.00	(628,567,231,000.00)	33.33
3 Dana Alokasi Khusus	61,102,870,000.00	18,330,861,000.00	(42,772,009,000.00)	30.00

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mediaty (2012), Kharisma (2015) dan Wulandari dan Mutmainah (2011) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja SKPD

Hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja

perangkat daerah. Tetapi hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Safitri (2017) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian intern yang diterapkan oleh suatu organisasi maka akan semakin besar kemungkinan tujuan organisasi tersebut akan tercapai

dengan baik salah satunya adalah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ranti Oktari (2011) dan Irene China (2015) yang menyatakan bahwa Pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden dan pengujian serta analisis yang telah dilakukan, maka dengan itu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman sistem akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Pemahaman sistem akuntansi mempengaruhi kinerja SKPD, semakin memiliki tingkat pemahaman sistem akuntansi yang tinggi maka akan

meningkatkan kinerja pegawai di organisasi pemerintah.

2. Partisipasi penyusunan anggaran memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Partisipasi penyusunan anggaran tidak mempengaruhi kinerja SKPD.

3. Komitmen organisasi memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Komitmen organisasi tidak mempengaruhi kinerja SKPD.

4. Pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Pengendalian intern mempengaruhi kinerja SKPD. Semakin baik penerapan pengendalian intern disebuah organisasi maka kinerja akan lebih efektif dan efisien secara maksimal sesuai dengan tujuan pemerintah daerah tersebut.

Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Bantul dengan demikian hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan.
2. Data dari penelitian ini diambil hanya melalui penyebaran kuisioner tanpa ada wawancara, dengan demikian sebagian besar hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran agar dapat dijadikan perbaikan untuk penelitian selanjutnya dengan judul yang sama :

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuisioner agar jawaban kuisioner lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lain yang belum atau jarang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anung Novianto, 2012, "Pengaruh pemahaman sistem akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah" *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Agustina, 2009, "Pengaruh sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap pengendalian internal dan kinerja perangkat daerah" *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Adizatur, 2019, "Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan pemahaman sistem akuntansi terhadap aparatur kinerja pemerintah daerah dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening" *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Abdullah, 2015, "Pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, penata usahaan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah, terhadap kinerja SKPD pada pemerintah daerah Aceh" *Jurnal Magister Akuntansi*, Vol.4, NO.2, Hal. 41-43
- Adamy, 2010, "Pengaruh kompensasi, kepemimpinan dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial pada SKPD kota Lhokseumawe" *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol.8 , No.4, Hal1133-1142

- Ekky Pratami, 2015, "Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan, dan Motivasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah" *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Fira Apriani, 2015, "Pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah" *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Gustika Yolanda, 2008, "Pengaruh Sistem Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD" *Artikel Ilmiah, Padang, Universitas Negeri Padang*
- Hikmatul, 2016, "Pengaruh pengawasan intern dan sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah" *Artikel ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bandung, Universitas Komputer Indonesia*
- Irine Chintya, 2015, "Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah kota Solok" *Artikel ilmiah, Padang, Universitas Negeri Padang*
- Juliana mega, 2011, "Pengaruh komitmen organisasi, partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. (studi Empiris pada pemerintah kota yogyakarta)" *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Jihan Rosyd Haryadi, 2012, "Pengaruh komitmen organisasi, partisipasi anggaran, evaluasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian akuntansi terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah" *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Kharisma, 2015, "Pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, Kompetensi, Terhadap kinerja aparat pemerintah daerah melalui good governance sebagai variabel moderasi" *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Kunawiyah, 2010, "Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening" *Skripsi Universitas Diponegoro*
- Latif farid muharom, 2014, "Pengaruh partisipasi anggaran terhadap manjerial pada direktorat jenderal perbendaharaan" *Skripsi Universitas Diponegoro*
- Mediaty, 2012, "Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah provinsi selatan" *Majalah ekonomi No. 3, Desember, Hal. 299-311*
- Munadiroh, 2015, "Pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran budaya organisasi, komitmen organisasi, informasi asimetri dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel pemoderasi" *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Nivo Wulandari, 2007, "Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah" *Artikel Ilmiah, Padang, Universitas Negeri Padang*
- Nazarudin, iLetje. 2009, "Modul Praktikum Komputer Statistika" universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- Ranti Oktari, 2011, “Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah“ *Jurnal ekonomi* Vol. 19 No. 02 Hal. 11
- Riharjo, 2013, “Pengaruh partisipasi anggaran, desentralisasi, komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial pada pemerintah kota surabaya” *Jurnal dan riset akuntansi*, Vol.1, No.1, Januari, Hal. 108-121
- Siti khairina Safitri, 2016, “Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi Kinerja Aparatur “ *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Saifulloh, 2013, “Pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah pada kabupaten Subang” *Jurnal program studi akuntansi*, Fakultas ekonomi, Universitas Komputer Indonesia, Bandung
- Sarjito, Bambang dan Oesmand Muthaher, 2007, “Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, budaya dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating” *Simposium Nasional Akuntansi X*, Makassar.
- Setyawan, 2012, “Pengaruh Partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi, motivasi desentralisasi dan job relevant information sebagai variabel moderasi“ *Jurnal akuntansi dan investasi volume No.2, Hal.197-207, Juli 2012*
- Safitry, 2017, “Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai Variabel Intervening“ Riau, *JOM Fekom*, Vol.4 No.1 2017
- Tuasikal, 2008, “Pengaruh Pengawasan Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja SKPD Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku” *Artikel Ilmiah*, Ambon, Universitas Patimura Ambon
- Wulandari dan Mutmainah, 2011, “Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, kepuasan kerja dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating pada kabupaten Demak“ Hal.1-25
- Penulis: MRF, Editor: Ton , *TribunJogja.com*, di akses tanggal 28 November 2018 pukul 10.46 wib
- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK DIY), Laporan hasil pemeriksaan kinerja pemda Bantul 2015, pada tanggal 11 April 2019
- Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pemda dalam memajemen keuangan
- Permendagri no.22 tahun 2011 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 Tentang Standar akuntansi pemerintah
- <https://www.bantulkab.go.id/>